

HIGHLIGHT



TFCA
SUMATERA
TROPICAL FOREST
CONSERVATION ACTION

Galeri Mitra

Pelatihan Penguatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Bagi Mitra Sumatera

Lampung - Pada akhir Oktober lalu Konsorsium Kota Agung Utara (Korut) menjadi tuan rumah acara "Pelatihan Penguatan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bagi Mitra TFCA-Sumatera" (26-27 Oktober).

Pelatihan ini merupakan ajang pembelajaran bagi mitra-mitra TFCA-Sumatera yang fokus pada HKm. Pelatihan dibuka oleh Asisten II Bupati Tanggamus.

Hari pertama, peserta dibekali dengan materi tentang proses pengajuan HKm dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung, kewirausahaan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dari Kepala BPDas (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai), serta inspirasi pengelolaan HKm

Diterbitkan oleh:
Tropical Forest Conservation Action
for Sumatera

Administrator:
Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
Jl. Bangka VIII no. 3 B Pela Mampang Jakarta 12720



Galeri Mitra

Lahirnya Forum Komunikasi Perhutanan Sosial Mitra TFCA-Sumatera pada Pelatihan penguatan HKm.

Program Hibah

Temu ahli badak, menyusun strategi dan prioritas TFCA-Sumatera dalam pendanaan konservasi badak Sumatera.

Potret Sumatera

Konsorsium Alert berupaya mencegah kebakaran di Rawa Kadut, Taman Nasional Way Kambas.



oleh Fajar Sumantri, coordinator Konsorsium Korut. Pada hari kedua, peserta diajak untuk berkunjung ke lapangan untuk belajar langsung dari para pelaku HKm.

"Kami sangat kagum dengan pola pelaksanaan HKm yang berjalan dengan baik di Lampung. Komitmen dan dukungan *stakeholder* terutama dari pemerintah sangat tinggi. Kami ingin belajar dari Tanggamus bagaimana cara menciptakan

suasana yang kondusif untuk mengembangkan HKm di Sumatera Utara" ucap Pendi, peserta dari Lembaga PETRA. Senada dengan Pendi, Barliana peserta dari Yayasan Caritas PSE Kam., juga mengambil banyak pembelajaran dari pelatihan ini. Saat ini lembaga tersebut sedang mengelola HKm dan masih perlu mempelajari konsep implementasi perhutanan sosial secara lebih mendalam.

Melalui acara ini juga telah lahir Forum Komunikasi Perhutanan Sosial (FKPS) Mitra TFCA-Sumatera. Sebuah forum yang digagas untuk mengawal percepatan implementasi perhutanan sosial tingkat daerah. Anggota forum ini adalah mitra TFCA-Sumatera yang memiliki kegiatan HKm di wilayah kerja masing-masing. [YAN]

Mendesak Implementasi Perhutanan Sosial Tingkat Daerah

Lampung – Forum Komunikasi Perhutanan Sosial (FKPS) Mitra TFCA-Sumatera meminta Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar mendesak pemerintah provinsi

untuk mempercepat implementasi Perhutanan Sosial (PS). Melalui forum tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berharap agar lebih banyak lagi kawasan hutan (perhutanan sosial) yang dapat dikelola oleh masyarakat. Perhutanan sosial adalah skema pengelolaan hutan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal yang fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan.

"Pengelolaan perhutanan sosial kini berada di bawah otoritas provinsi. Jadi sudah seharusnya para pemimpin daerah didorong untuk merealisasikan komitmen dan target PS di wilayahnya", ucap Fajar Soemantri, Ketua FKPS Mitra TFCA-Sumatera, pekan lalu. Forum tersebut meminta Menteri LHK untuk mendesak pemerintah daerah agar mempercepat dan mendorong penerapan program PS khususnya skema Hutan Kemasyarakatan.

Saat ini, capaian target implementasi PS seluas 12,7 juta Ha (hingga tahun 2019) pemerintah masih cukup rendah. Realisasi capaian tersebut baru berkisar 200.000-300.000 Ha pertahun-



Diskusi diantara para peserta saat kunjungan lahan

nya. Tingkat capaian yang masih minim ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, jumlah UPT (Unit Pengelola Teknis) yang hanya lima dari semula 36 UPT, dan proses verifikasi yang lama. FKPS Mitra TFCA-Sumatera diharapkan dapat membantu kementerian dalam menyukseksan program Perhutanan Sosial. Caranya dengan memberikan informasi tangan pertama mengenai kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan program tersebut.

Forum yang baru saja dibentuk dalam acara "Pelatihan dan Penguatan Hutan Kemasyarakatan Mitra TFCA-Sumatera" di Tanggamus didukung oleh 9 lembaga inisiatif pembentuk forum tersebut. Mereka adalah Petra, Caritas PSE, Petai dari Sumatera Utara; Yayasan TN Tesso Nilo dari Riau; Ulayat (Bengkulu); Kinapat Mentawai (Sumatera Barat); HAKI (Jambi), Konsorsium Kota Agung Utara dan Yayasan Konservasi Way Seputih dari Lampung. Lembaga-lembaga peserta forum ini merupakan pendamping masyarakat untuk HKm di wilayah masing-masing. [AS]



Lokasi HKm Kelompok Tani Bakti Makmur 10 di kaki Gunung Tanggamus yang dikunjungi oleh para peserta pelatihan.



Patroli Masyarakat, Asa Menyelamatkan Hutan Tesso Nilo Tersisa

“Sebagai orangtua, saya merasa sedih. Anak-anak sekarang tak lagi kenal buah Tampui, minyak seminai, kayu kulin dan lain-lainnya. Padahal itu sangat berguna sebagai sumber makanan, kesehatan, dan aspek kehidupan lain. Dari hutan kita dapat hidup.” ungkap Moncol, warga masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.

Moncol bercerita ketika muda dahulu, ia dan rekan-rekan sebayanya begitu akrab dengan hutan. Tidak seperti anak-anak sekarang yang sudah asing dengan hutan dan isinya. Padahal hutan dan masyarakat saling melengkapi dan membutuhkan. Hutan selalu memberikan apa yang masyarakat butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Imbalannya masyarakat harus menjaga hutan untuk kelangsungan hidup sehari-hari mereka.

Alasan tersebut yang membuat Moncol dan lima warga Lubuk Kembang Bunga memutuskan berpartisipasi menjadi anggota patroli masyarakat. Mereka tergabung dalam tim patroli masyarakat di wilayah hutan Tesso Nilo. Patroli masyarakat yang difasilitasi oleh Konsorsium Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo dan TFCA-Sumatera ini bertugas untuk menjaga taman nasional Tesso Nilo dari perambah.

Menurut Yuliantony kegiatan patroli masyarakat penting dalam melindungi dan pengeloaan TNTN. Patroli ini juga menutup keterbatasan sumber daya manusia dari pihak taman nasional. Bahkan lebih jauh

lagi untuk memunculkan kembali kearifan lokal masyarakat.

Direktur Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut menambahkan bahwa kearifan lokal masyarakat setempat perlu diangkat kembali. Misalnya masyarakat Petalangan di sekitar lokasi ternyata memiliki kearifan lokal seperti aturan yang melarang menebang pohon yang sedang berbunga, berbuah, dan juga bergetah. Ada pula aturan yang mengharamkan menebang kayu tunggal, yakni kayu yang hanya ada sebatang di suatu lokasi.

Kearifan lokal saat ini penting untuk membentengi hutan dari serbuan para perambah. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang tentang tata cara atau aturan tertentu. Kearifan lokal mampu menjembatani pemanfaatan lestari masyarakat dan perlindungan hutan.

Pelatihan Patroli Masyarakat

Pada pertengahan bulan Mei, Moncol bersama timnya dan tim dari Desa Air

Hitam di Kecamatan Ukui serta Desa Situgal di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti pelatihan patroli masyarakat. Pelatihan diadakan di Balai Desa Air Hitam dengan masing-masing desa diikuti oleh enam orang.

Pelatihan patroli memang baru pertama kali diadakan. Namun secara tidak resminya, pelatihan sudah sering diadakan melalui pendampingan lapangan oleh YTNTN. Materi pelatihan ini mencakup sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) patroli masyarakat, ragam kejahatan kehutanan, teknis-teknis pelaksanaan patroli dan pelatihan pengisian lembar hasil patroli.

Patroli masyarakat dan segala aktivitasnya telah membangkitkan semangat masyarakat untuk menjaga hutan mereka. Tugas selanjutnya adalah soal menjaga asa mereka untuk terus melestarikan hutan Tesso Nilo ditengah gempuran perambahan yang masif. [YAN]



Pelatihan Forensik untuk Penegak Hukum di Aceh

Aceh – Konsorsium Lembaga Suar Galang Keadilano (LSGK) mengadakan “Pelatihan Peningkatan Kemampuan Ilmu Pembuktian Barang Bukti (Forensik Terbatas) Terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi” pada tanggal 23-25 Agustus 2016.

Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan kapasitas para Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh dan para Penyidik di tingkat Kepolisian Resor (Polres). Materi yang diajarkan mencakup kemampuan teknis terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang meliputi: a) kemampuan teknis dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum terhadap (tumbuhan dan satwa liar) yang dilindungi, b) kemampuan identifikasi /ilmu pembuktian barang bukti kejadian terhadap tumbuhan, dan c) satwa liar yang

dilindungi.

Pelatihan dibuka oleh AKBP Drs. Ridwan Usman yang menjabat sebagai Wadir Rekrimsus Polda Aceh dan Komisaris Besar Polisi (Purn) Dra. Pengasihan Gaut selaku Direktur Lembaga Suar Galang Keadilan. Sejumlah 34 orang mengikuti training yang dilaksanakan selama 3 hari. Peserta berasal dari Polda Aceh, Polres Aceh Barat, Polres Nagan Raya, Polres Aceh Barat Daya dan Polres Aceh Selatan serta PPNS/Polhut dari BKSDA Aceh.

Kasubdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan materi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan hukum terpadu. Selain beliau, masih ada pemateri dari Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Aceh yang menyampaikan materi tentang konservasi

tumbuhan dan satwa liar. Pemateri berikutnya dari Wild Conservation Society (WCS) - Indonesia Program yang menyampaikan subyek tentang forensik terbatas dan pengenalan anatomi atau morfologi satwa yang dilindungi. Terakhir pemateri dari Trainer Polda Aceh menyampaikan materi tentang Inter Personal Skill (IPS) Terapan.

Melalui pelatihan ini peserta mendapatkan pengetahuan dasar tentang forensik terbatas. Menurut salah satu peserta, training ini memudahkan penyidik di lapangan dalam menangani kasus kejadian satwa liar. Peningkatan kapasitas untuk penegak hukum manfaatnya tidak saja dirasakan oleh peserta. Namun lebih luas lagi untuk kelestarian hutan seisinya dan upaya konservasi sumberdaya alam. [YAN]



Program Hibah

Diskusi Ahli: Strategi dan Prioritas TFCA-Sumatera dalam Pendanaan Konservasi Badak Sumatera

Jakarta – Para ahli badak berkumpul untuk membahas strategi dan prioritas pendanaan konservasi badak Sumatera pada pertengahan Agustus 2016 di Jakarta.

Jumlah populasi badak yang terus menurun menimbulkan keprihatinan para pakar serta menjadi peringatan dini bagi upaya konservasi untuk melestarikan spesies ini. Kuantitasnya yang kurang dari 100 individu dan terpisah di 3 kantong populasi (Leuser, Way Kambas dan Bukit Barisan Selatan) menjadi problem tersendiri, antara lain kemampuan reproduksi rendah, risiko *in-breeding* tinggi, dan keragaman genetik rendah. Belum lagi faktor patologi yang menyebabkan penurunan kemampuan reproduksi pada betina.

Pertemuan yang menghadirkan pakar badak dalam dan luar negeri ini menghimpun berbagai informasi, pemikiran, pengalaman, gagasan, dan visi, di tataran strategis maupun tingkat tapak dalam kaitannya dengan konservasi *Dicerorhinus sumatrensis*. Hasil diskusi akan dijadikan acuan strategi dan prioritas pendanaan TFCA-Sumatera untuk konservasi hewan tercancam punah. Saat

ini TFCA-Sumatera dipercaya untuk mengelola dana pengalihan utang untuk lingkungan sebesar 42,7 juta USD, dimana 12,7 juta USD diantaranya diprioritaskan untuk program pelestarian 4 satwa kunci Sumatera yaitu badak, harimau, gajah, dan orangutan.

Diskusi yang dimoderatori oleh Samedi, Direktur Eksekutif TFCA-Sumatera, mengidentifikasi beberapa hambatan dalam upaya konservasi.

Pertama, populasi badak Sumatera terus menurun sampai 90% dalam 3 dekade (dari angka estimasi 800 individu pada pertengahan 1980an menjadi sekitar 80 individu pada mengingat populasi badak Sumatera saat 2010an). Hal ini sangat mengkhawatirkan karena situasinya sama persis dengan badak Sumatera di Malaysia 20-30 tahun yang lalu. Saat itu di Malaysia diperkirakan terdapat puluhan individu satwa yang memiliki dua cula ini, namun sekarang hanya tersisa 3 ekor. Itu pun tinggal hidup di penangkaran.

Kedua, upaya perlindungan dan monitoring yang selama ini dilakukan

(selama 30 tahun) ternyata belum cukup efektif.

Ketiga, belum ada data dan informasi yang pasti mengenai kondisi populasi, baik jumlah, demografi, dan kondisi kesehatan. Data populasi yang tersedia juga belum bisa menduga tingkat viabilitas populasi, sehingga sulit menentukan strategi, prioritas, dan aksi konservasi yang diperlukan. Terakhir, tidak ada pemusatan atau sistem pengelolaan data (*database*).

Selain berhasil mengidentifikasi hambatan upaya konservasi juga dirumuskan beberapa rekomendasi penting untuk strategi pendanaan badak Sumatera, antara lain: penyiapan kelembagaan yang berperan sebagai pengarah dan penyelia program secara nasional; penyediaan data akurat mengenai kondisi populasi untuk pengambilan keputusan konservasi yang tepat; serta penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) penyelamatan badak. [YAN]



Menyanga Taman Nasional Kerinci Seblat dengan Pertanian Ramah Lingkungan

Jambi - Yayasan Mitra Aksi mengenalkan konsep model pertanian sehat, ramah lingkungan, dan rendah biaya kepada para petani lokal di Kecamatan Jangkat, Provinsi Jambi. Jangkat merupakan kawasan penyanga Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Merangin. Kondisi Jangkat cukup memprihatinkan dengan tingginya tingkat perambahan yang telah masuk ke dalam kawasan taman nasional. Tingkat keberhasilan program dinilai cukup tinggi ditandai dengan makin banyak dan antusiasnya petani setempat untuk mengikuti dan mengadopsi program ini. Program ini menjadi benteng Taman Nasional Kerinci Seblat dari ancaman perambahan.

Ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan yang dilakukan oleh Mitra Aksi, salah satunya adalah implementasi model pertanian sehat, ramah lingkungan dan rendah biaya. Metode ini telah memberikan pengetahuan baru bagi petani dalam mengatasi masalah efektivitas lahan. Pertanian ramah lingkungan ternyata didapati lebih produktif. Hasilnya mulai dapat dirasakan petani di 4 desa dalam

mengatasi masalah penurunan produktivitas komoditas yang ditanam, dan mengurangi penggunaan input kimia. Implementasi proyek mulai menunjukkan hasil positif dalam merehabilitasi kembali lahan kritis untuk dikelola secara produktif oleh petani dan mengurangi kecenderungan petani membuka lahan baru dikawasan hutan alam dengan alasan lahan pertanian yang ada tidak lagi produktif atau subur.

Petani kini mulai menyadari bahwa selama ini pengolahan lahan pertanian dilakukan dengan kurang tepat. Petani sadar bahwa akibat pertanian yang tidak selaras dengan alam tidak saja menyebabkan rusaknya lahan-lahan pertanian mereka, tetapi juga berdampak pada menurunnya produktifitas dan tingginya biaya produksi. Pendapatan pun semakin berkurang. Keterlibatan kaum perempuan, baik yang terorganisir melalui Kelompok Tani Perempuan (KWT) maupun kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) desa dalam memulai gerakan pertanian organik lebih ditingkatkan. Kaum perempuan di setiap desa mulai

membuat kebun-kebun keluarga dengan tanaman sayur secara organik untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Hal demikian ternyata dapat mengurangi biaya konsumsi keluarga, sehingga bisa menghemat pengeluaran harian. Kaum perempuan juga secara aktif ikut dalam membuat pupuk organik cair dan padat, pemurnian benih lokal, serta pengendalian hama secara alami.

Melihat keberhasilan demplot Mitra Aksi, para petani berlomba-lomba menyediakan lahan pertaniannya sebagai pusat belajar bersama. Berapa pun luasnya petani siap menyediakan untuk kepentingan Mitra Aksi mendampingi petani. Mitra Aksi bersama dengan petani muda atau pemuda desa melakukan pemetaan tata guna lahan, menyusun, membuat pusat data kepemilikan lahan, dan rencana pengelolaanya. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Jangkat tidak lagi kekurangan lahan produktif untuk pertanian. Masyarakat tidak perlu lagi membuka lahan baru untuk bercocok tanam. Semua tercukupi berkat pertanian ramah lingkungan. **[AS]**



Kemitraan untuk Meningkatkan Kualitas Kopi Sipirok

Jakarta - Yayasan KEHATI bekerjasama dengan PT. Twind Niaga Hutama dan Petra, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pembinaan petani kopi di desa Sialaman, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Kerjasama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kopi sekaligus menggenjot produksi kopi dua kali lipat.

"Kami berharap dapat menghasilkan biji kopi kualitas premium dan kuantitas panen yang bertambah dari rata-rata 700 kg per hektar menjadi 1500 kg per hektar, dengan areal

pembinaan 100 hektar. Diharapkan petani dapat bertambah penghasilannya hingga 4 miliar per tahun," ujar Stephen Lo, dari Twind Niaga Hutama.

Perkebunan kopi yang dikelola masyarakat di Sipirok merupakan zona penyangga Cagar Alam Sibual-buali yang terletak pada ketinggian 1200-1300 mdpl.

Lokasi ideal yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu sentra kopi arabika terbaik di Sumatera. Namun saat ini proses budidaya kopi di lokasi tersebut belum optimal. Proses panen dan pascapanennya belum sempurna. Ditambah biji kopi yang dijual langsung tanpa melalui proses nilai tambah ke Siborong-borong dihargai rendah.

Direktur Program Yayasan KEHATI, Teguh Triono menyampaikan bahwa

perjanjian kerjasama ini mengarahkan pola peningkatan kualitas dan kuantitas kopi tanpa ekstensifikasi kebun dengan merambah hutan. Melalui kerjasama yang difasilitasi PETRA dan TFCA-Sumatera ini, produksi kopi diharapkan akan meningkat dengan harga yang lebih tinggi.

"Akan diturunkan sekitar 8-10 orang pakar di bidang yang berbeda ke Sipirok secara bertahap, ada pakar budidaya, fermentasi, greenbean, penyimpanan dan roasting," tambah Stephen Lo. Kerjasama tripartit antara KEHATI, Twind Coffee, dan Petra memang dimaksudkan untuk membimbing petani melakukan budidaya kopi dengan lebih baik. Lalu menyempurnakan proses buah kopi hingga menjadi *greenbean*, sehingga kopi bisa diproduksi lebih banyak dan dijual dengan harga lebih baik, bahkan diekspor. [AS]

Potret Sumatera

Kanan : Tidak mudah menyisir padang ilalang untuk patroli kawasan

Bawah : Menyengkirkan ilalang untuk memberi ruang hidup bagi tanaman restorasi



MELAWAN SI JAGO MERAH

Areal Reforestasi Rawa Kadut, Lampung. Kebakaran hutan acap kali terjadi terutama ketika musim panas. Kondisi panas membuat vegetasi menjadi kering. Hanya dibutuhkan satu jentik rokok saja untuk memantik kebakaran hebat. Konsorsium Alert mencoba mengantisipasi kebakaran seperti itu di Areal Rawa Kadut. Areal ini masuk ke dalam SPTN (Seksi Pengelolaan Taman Nasional) II Way Bungur, Taman Nasional Way Kambas. Tumbuhan yang dipilih untuk restorasi kawasan adalah jenis tumbuhan tahan api sekaligus pakan kesukaan gajah. Namun luasnya kawasan dan cepatnya ilalang yang tumbuh sering kali merepotkan upaya pengendalian kebakaran.



Pos jaga untuk memantau kebakaran



Atas : Puspa (*Schima wallichii*) tumbuhan tahan api untuk restorasi kawasan

Kiri : Seorang staf konsorsium sedang merawat bibit untuk restorasi